

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



BPK Kalbar Serahkan LHP LKPD TA 2021 Pada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Pontianak, 17 Mei 2022 - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak di Aula BPK Kalbar. Acara dilakukan secara langsung dengan mengundang Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Rahmadi** didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, dan Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **R.M. Heribertus Kurniawan**.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak tanggal 31 Desember 2021 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya atau dengan kata lain "**Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP**". Dengan opini WTP ini diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras dan

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, sehingga dapat terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel dan transparan.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah secara umum, diantaranya:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan, yaitu tunggakan pembayaran retribusi pendapatan pemanfaatan kekayaan daerah atas pemanfaat tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).
2. Permasalahan yang berkaitan dengan Belanja, yaitu kesalahan penganggaran belanja, baik belanja modal maupun belanja barang; kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa, gaji, tunjangan dan honorarium; pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib; dan kekurangan volume pekerjaan dan denda atas keterlambatan belum dikenakan.
3. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kas dan piutang, yaitu pengelolaan kas dan setara kas belum tertib.
4. Permasalahan pengelolaan Aset, yaitu pengelolaan aset daerah belum tertib dan belum memadai yang meliputi Pengelolaan Kas, Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan mengharapkan apa yang telah kita capai bersama dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR